

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung

Analysis the Statement of Budget Realization for Measuring a Financial Performance on Government of Bandung City 2017 -2020

Rizka Amanda

Program Studi D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: rizka.amanda.amp17@polban.ac.id

Khozin Arief

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: khozin.arief@polban.ac.id

Jouzar Farouq Ishak

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: jouzar.farouq@polban.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the financial performance of the Bandung City Government in 2017 – 2020. The research method is used descriptive quantitative by measuring the level of financial ratios. The ratios are effectiveness, efficiency, independence, compatibility, and growth. The data obtained comes from the Bandung City Government Budget Realization Report document from 2017 - 2020. The results of the research show that the effectiveness ratio level of PAD receipts in Bandung City is quite effective, the level of efficiency ratio is still above 80% indicating that financial performance is less efficient, the level of independence ratio in a period of 4 years has decreased from delegative to participatory one, the level of compatibility ratio of the allocation of funds is still prioritizing operating expenditure over capital expenditure, the financial growth ratio rate from 2017 – 2019 experienced positive and negative growth, but growth for 2020 all aspects of APBD experienced negative growth due to the Covid-19.*

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Independence, Compatibility, Growth*

1. Pendahuluan

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi, tetapi telah beralih ke desentralisasi. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk secara leluasa mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip daerah otonom. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah harus mampu mendanai kepentingan daerahnya demi meningkatkan kemandirian secara fiskal. Dalam memenuhi kebutuhan fiskal tersebut, maka pemerintah daerah harus bisa mencari sumber penerimaan secara optimal untuk membiayai pengeluarannya.

Demi meraih keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin dalam hal peningkatan kinerjanya untuk mengelola keuangan. Anggaran yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah selanjutnya dibuat laporan pertanggung jawaban setiap periode untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam bentuk laporan keuangan

daerah. Laporan ini menyajikan berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga menggambarkan apakah pemerintah sudah menggunakan anggarannya dengan baik atau tidak. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri 7 macam yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berisikan tentang kondisi dari realisasi suatu anggaran dari suatu entitas pemerintah yang disusun menurut standar laporan realisasi anggaran. Menurut Mahsun (2015:120) yang dimaksud dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan entitas yang memberikan informasi terkait anggaran penerimaan yang berupa pendapatan dan pengeluaran berupa belanja yang ditetapkan lalu dibandingkan dengan realisasinya. Dalam laporan tersebut dijelaskan tentang apakah sumber daya ekonomi yang didapatkan oleh suatu daerah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Kinerja merupakan capaian usaha dalam melakukan aktivitas keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Dona (2020) untuk memperoleh posisi keuangan yang sesuai dengan keadaannya, pemerintah dapat melakukan penilaian kinerja dengan melakukan berbagai analisis yang mana salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Pengukuran rasio dilakukan untuk memberi penjelasan dan gambaran informasi terkait posisi keuangan pemerintah sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Pengukuran rasio keuangan dalam penelitian ini akan terdiri beberapa jenis yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Setiap rasio yang ada memiliki gambaran masing – masing mengenai kinerja keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan didukung oleh beberapa fenomena yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah penilaian kinerja keuangan Kota Bandung menurut hasil penelitian (Fazlurahman, Chandra & Rifqie, 2020:62) untuk tahun 2014 – 2018 dilihat dari aspek rasio keuangan adalah untuk hal kemandirian, Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Untuk efektifitas PAD mengalami fluktuasi yang artinya belum adanya kestabilan dalam meningkatkan efektifitas PAD walaupun pada tahun 2018 terdapat kenaikan rasio yang signifikan. Untuk tingkat efisiensi PAD, Pemerintah Kota Bandung sudah termasuk ke dalam kategori yang sangat efisien. Dan berdasarkan rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2014 – 2017 mengalami stagnasi, lalu ditahun 2018 Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terkait pemaksimalan pendapatan asli daerah sehingga bisa meningkatkan rasio pertumbuhan PAD Kota Bandung.

Untuk memperkuat fenomena pada penelitian ini ditahun 2019 ditemukan masalah yaitu dilansir dari Tagar.id (16 Juli 2020). Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto, menuturkan bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diraih oleh Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2019 mengalami penurunan sehingga hasilnya jauh dari visi misi yang ada pada RPJMD Kota Bandung 2018 – 2023.

Kemudian masalah lain yang ditemukan adalah pada 2020 adalah di Indonesia khususnya Kota Bandung mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya kondisi anggaran pemerintah daerah. Seperti pada berita yang dimuat pada Prfmnews.id (04 Agustus 2020), menurut Arief Prasetya, Ketua Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, diketahui bahwa ditahun 2020 pajak hiburan tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga akhirnya pemerintah daerah mengubah angka target pendapatan asli daerah Kota menjadi Rp2,25 triliun yang semula sebesar Rp2,7 triliun.

Dilihat dari penjelasan di atas terkait kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung yang dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran dan juga peristiwa – peristiwa yang terjadi di lapangan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui

bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung dari Tahun 2017 – 2020 jika berdasarkan rasio keuangan yaitu dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

2. Kajian Pustaka

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Semua laporan ini dibuat setiap periode anggaran berjalan. Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif, antara lain relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami. Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo kelebihan anggaran, neraca, laporan operasi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran termasuk salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk petanggung jawaban yang berisikan mengenai informasi dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi yang ada dengan anggaran yang ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran dibuat dengan tujuan menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi. Manfaat yang didapat dengan dibuatnya Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai *predictive value*, yang artinya informasi yang dijadikan gambaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan alat proyeksi kebijakan keuangan dan sebagai *feedback value*, yang berarti informasi dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen. Laporan realisasi anggaran memuat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. Unsur-unsur tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan meliputi pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan.

Kinerja keuangan adalah kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap aktivitas untuk melihat sudah sejauh mana tingkat keberhasilan suatu entitas dalam melaksanakan pekerjaannya dan menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tingkat kinerja keuangan dapat diukur oleh pemerintah dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mengukur tingkat kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya maka digunakan analisis rasio keuangan. Tujuan dari perhitungan rasio ini dikemukakan oleh Halim (2013). Jenis rasio keuangan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Efektifitas

Seperti yang ditunjukkan oleh Halim (2013), rasio efektifitas merupakan representasi dari tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi rencana pengeluaran pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini berisi perbandingan antara realisasi PAD dan anggarannya. Kemampuan daerah bisa dikatakan efektif, apabila rasio efektifitas bernilai sebesar minimal 100%. Berikut adalah tabel kriteria rasio efektivitas keuangan daerah;

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Susanto (2014)

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel berikut menunjukkan standar rasio efisiensi keuangan daerah:

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Susanto (2014)

c. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahnya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ketiga. Rasio kemandirian juga menjelaskan sejauh mana kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Tingginya rasio kemandirian menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah. Berikut adalah tingkatan kriteria dalam rasio kemandirian :

Tabel 2.3 Kriteria Rasio Kemandirian

Presentasi Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Abdul Halim dalam Azhari (2017)

Pola hubungan yang ditimbulkan atas hasil rasio kemandirian laporan keuangan memiliki penjelasan mengenai seberapa mandiri pemerintah daerah mendanai daerahnya :

1) Pola Instruktif

Pola ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih memerlukan banyak pengarahan dan juga petunjuk dari pemerintah pusat.

- 2) Pola Konsultatif
Pola ini menilai adanya peningkatan kemampuan dari pemerintah daerah sehingga pengarahan dari pemerintah pusat berkurang.
 - 3) Pola Partisipatif
Pola ini menilai bahwa tingkat kemandirian dari pemerintah daerah semakin meningkat dan pengarahan dari pemerintah pusat berkurang, sehingga pemerintah daerah dapat dikategorikan hampir mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
 - 4) Pola Delegatif
Pola ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah bisa dikatakan mandiri untuk menjalani urusan pemerintahnya dan mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
- d. Rasio Keserasian
Tingkat rasio keserasian menjelaskan upaya pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi dana untuk kegiatan belanja sehari-hari dan belanja pembangunan. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan oleh pengeluaran rutin (biaya operasional), semakin rendah rasio yang dihasilkan oleh pengeluaran pembangunan (biaya modal).
- e. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan mendorong keberhasilannya dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran laju pertumbuhan bertujuan untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran sebagai dasar penilaian potensi unsur-unsur APBD yang akan diprioritaskan.

3. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode deskriptif kuantitatif. Dengan objek dalam penelitiannya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 – 2020 dengan menghitung rasio keuangan, yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Data yang dibutuhkan berasal dari data sekunder yang diambil dengan teknik dokumentasi. Data yang didapat berupa data dokumenter yaitu dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung yang menggunakan studi *time series*, yaitu datanya ada pada rentetan waktu tertentu. Periode laporan yang dipakai dalam pengambilan data dari Laporan Realisasi Anggaran ini adalah tahun 2017 sampai dengan 2020. Metode analisis data yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif dan perhitungan rasio keuangan. Perhitungan masing – masing rasio keuangan tersebut ditulis dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas

Rasio ini diukur dengan membandingkan kinerja dan anggaran PAD. Kemudian, tingkat rasio pendapatan dikelompokkan menurut standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 pada tahun 1996. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Dalam menghitung rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah digunakan perbandingan antara total biaya perolehan beban dan pendapatan. Hasil perhitungan ini kemudian diklasifikasikan menurut standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1996 No. 690.900.327. Rumus untuk indeks efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan transfer yang diterima. Kemudian, tingkat rasio pendapatan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan dan pola hubungan yang dihasilkan dalam penelitian Azhari (2017). Perhitungan rasio kemandirian diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Tingkat kesesuaian menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Perhitungan rasio ini dibagi menjadi dua perhitungan, yaitu rasio biaya operasional dan rasio biaya modal. Rumus untuk menghitung rasio keserasian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan menggambarkan realisasi pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Cara mengukur tingkat pertumbuhan adalah dengan membandingkan selisih antara pendapatan periode tertentu dengan periode sebelumnya dengan pendapatan tahun sebelumnya. Rasio tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } n - \text{Pendapatan Tahun } (n - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintah Kota Bandung bisa dikatakan efektif bila tingkat rasio yang efektifitas yang diperoleh oleh pemerintah mencapai lebih dari 100%. Tingginya nilai rasio efektifitas menunjukkan baiknya kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menggunakan pendapatannya. Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas yang dijelaskan di atas didapatkan hasil efektifitas kinerja Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020 (Rp)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kriteria
2017	2.578.457.420.885,00	3.015.836.590.302,00	85,50%	Cukup Efektif
2018	2.571.591.786.199,00	3.397.309.517.811,00	75,69%	Kurang Efektif
2019	2.548.258.990.275,00	3.252.540.610.057,16	78,35%	Kurang Efektif
2020	2.063.783.773.735,92	2.264.814.094.039,25	91,12%	Efektif
Rata – rata			82,67%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.1, hasil perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2017-2019 belum meraih kriteria yang efektif. Dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 90%. Di tahun 2020 barulah kinerja keuangan Kota Bandung mendapat kriteria efektif dengan rasio yang dihasilkan adalah sebesar 91,12%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah realisasi dan anggaran PAD pada tahun 2020 justru menurun. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi.

Masih belum tercapainya keefektifitas PAD disebabkan oleh kurang maksimalnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya penerimaan pendapatan seperti, adanya kebijakan terkait pemungutan pajak, adanya masalah dalam penganggaran dan realisasi retribusi, dan juga kurangnya kontribusi dari perusahaan daerah dalam pemberian hasil laba kepada pemerintah daerah.

4.2 Rasio Efisiensi

Kinerja Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan efisien apabila hasil nilai rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah kurang dari 80% . Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kemampuan pengeluaran publik untuk menghasilkan pendapatan. Hasil rasio efisiensi yang didapat dari perhitungan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020 (Rp)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio	Kriteria
2017	5.541.718.107.062,75	5.735.006.649.088,00	96,63%	Kurang efisien
2018	6.114.449.093.123,40	5.939.997.423.418,00	102,94%	Tidak Efisien
2019	6.312.147.268.359,67	6.381.818.944.636,00	98,91%	Kurang Efisien
2020	5.407.125.732.054,00	5.643.962.288.458,92	95,80%	Kurang Efisien
Rata – rata			98,57%	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.2, tingkat rasio efisiensi untuk kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020 belum mencapai kriteria yang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi masih di atas 80%. Dengan rata – rata yang dihasilkan sebesar 98,57% menunjukkan bahwa kinerja keuangan dinilai kurang efisien dalam mengeluarkan biayanya.

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukan kinerja dari pendapatan daerah Kota Bandung masih rendah dikarenakan nilai realisasi belanja masih lebih besar dan mendekati realisasi pendapatannya. Rendahnya hasil perhitungan rasio tersebut dilihat dari masih tingginya nilai belanja operasi setiap tahunnya. Walaupun tingkat rasio ditahun 2018 sangat tinggi, Pemerintah Kota

Bandung melakukan upaya dengan menekan biaya belanja di tahun – tahun selanjutnya sehingga bisa menurunkan persentasi dari perhitungan rasio efisiensi.

4.3 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk seluruh kegiatan yang ada pada pemerintahannya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tingkat rasio kemandirian menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan dari masyarakat nya dalam membayar pajak dan retribusi. Hasil perhitungan dari rasio kemandirian Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2017-2020 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020
(Rp)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Transfer	Rasio	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2017	2.578.457.420.885,00	3.135.976.228.203,00	82,22%	Tinggi	Delegatif
2018	2.571.591.786.199,00	3.324.851.637.219,00	77,34%	Tinggi	Delegatif
2019	2.548.258.990.275,00	3.626.141.954.361,00	70,27%	Sedang	Partisipatif
2020	2.063.783.773.735,92	3.352.264.380.653,00	61,56%	Sedang	Partisipatif
Rata – rata			72,85%	Sedang	Partisipatif

Sumber : Data diolah (2021)

Pada Tabel 4.3 menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan dari tingkat kemampuan tinggi menjadi sedang. Sehingga rata – rata rasio yang dihasilkan adalah sebesar 72,85% yang masuk kedalam tingkat kemampuan yang sedang. Menurunnya hasil rasio ini berpengaruh juga terhadap pola hubungan yang dihasilkan antara pemerintah daerah dengan pihak eksternal yaitu berawal dari delegatif menjadi partisipatif.

Penurunan tingkat rasio kemandirian ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung terhadap bantuan dari pihak luar dalam hal ini adalah pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ketergantungan ini dinilai meningkat karena nilai rasio yang semakin menurun. Pemerintah Kota Bandung dinilai belum cukup mampu dalam hal membiayai pelaksanaan pemerintahan dan juga dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan masih kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Hal lainnya yang dapat digambarkan dari rasio kemandirian yang dihasilkan adalah masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan juga retribusi daerah.

4.4 Rasio Keserasian

Rasio keserasian memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah dalam mengutamakan alokasi dana yang dimiliki, baik untuk Belanja sehari – hari maupun Belanja Pembangunannya. Pada rasio ini dihitung besarnya nilai rasio belanja operasi dan juga rasio belanja modal. Hasil perhitungan rasio keserasian untuk kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rasio Keresasian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020
(Rp)

Tahun	Belanja		Total Belanja	Rasio	
	Total Belanja Operasi	Total Belanja Modal		Operasi	Modal
2017	4.621.596.474.148,75	918.875.016.069,00	5.540.817.365.842,75	83,41%	16,58%
2018	5.061.556.927.300,40	1.049.696.223.623,00	6.112.928.484.623,40	82,80%	17,17%
2019	5.131.020.269.061,67	1.179.429.469.424,00	6.310.647.268.360,67	81,31%	18,69%
2020	4.650.334.229.661,00	558.480.387.618,00	5.374.019.732.054,00	86,53%	10,39%
Rata – rata				83,51%	15,71%

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasi. Tingkat rasio yang didapat pun tidak stabil. Walaupun begitu rasio belanja operasi masih berada di atas rasio belanja modal karena hasil yang didapatkan masih di atas 80% dari total belanja keseluruhan. Hal ini akan berpengaruh terhadap rasio belanja modal yang diperoleh yaitu masih dibawah 20%. Jika dirata – rata maka dari tahun 2017 – 2020 rasio belanja operasi mendapatkan hasil sebesar 83,51%, sedangkan untuk belanja modal rasio yang didapat adalah sebesar 15,71%

Berdasarkan rasio yang dihasilkan, tingginya alokasi dana untuk belanja operasi tersebut dikarenakan masih besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sedangkan rendahnya rasio belanja modal yang dihasilkan menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung belum sepenuhnya memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pembangunan daerah dalam hal ini adalah penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan juga pelayanan publik. Untuk ditahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 semua biaya belanja dialokasikan kepada Belanja Tak Terduga. Belanja modal ditahun 2020 semuanya dirasionalisasi sehingga dialihkan untuk penanggulangan pandemi.

4.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan juga memajukan keberhasilannya dalam mengelola keuangan. Rasio ini dapat dianalisis dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020
(Rp)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	Rata - rata
Pendapatan Asli Daerah	2.578.457.420.885	2.571.591.786.199	2.548.258.990.275	2.063.783.773.735,92	
Pertumbuhan PAD		-0,27%	-0,91%	-19,01%	-6,73%
Pendapatan	5.735.006.649.088	5.939.997.423.418	6.381.818.944.636	5.643.962.288.458,92	
Pertumbuhan Pendapatan		3,57%	7,44%	-11,56%	-0,18%
Belanja Operasi	4.621.596.474.148,75	5.061.556.927.300,40	5.131.020.269.061,67	4.650.334.229.661	
Pertumbuhan Belanja Operasi		9,52%	1,37%	-9,37%	0,51%
Belanja Modal	918.875.016.069	1.049.696.223.623	1.179.429.469.424	558.480.387.618	
Pertumbuhan Belanja Modal		14,24%	12,36%	-52,65%	-8,68%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan di atas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan Pemerintah Kota Bandung dari aspek pendapatan maupun belanja cenderung menurun selama 4 tahun. Untuk pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal dari tahun 2017 – 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan untuk pertumbuhan PAD dari tahun 2017 – 2019 mengalami pertumbuhan negatif. Untuk pertumbuhan dari 2019 – 2020 semua aspek dalam APBD mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pendapatan dan juga belanja akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap jumlah realisasinya.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data keuangan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung di tahun 2017 – 2020 masih tergolong kurang efektif dengan rata – rata rasio sebesar 82,67%. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Bandung dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah dan juga merealisasikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung jika dianalisis dengan Rasio Efisiensi dari tahun 2017 – 2020 belum menunjukkan hasil yang efisien dikarenakan nilai rasio masih diatas 90%. Dengan rata – rata yang didapat sebesar 98,57%, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung masih dikategorikan kurang efisien.
3. Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2017 – 2020 berdasarkan Rasio Kemandirian mengalami penurunan. Pada periode 2 tahun pertama tingkat kemampuan keuangan tinggi dengan pola delegatif. Tetapi di 2 tahun selanjutnya tingkat kemampuan menurun menjadi sedang dan pola hubungan pun berubah menjadi partisipatif. Penurunan tingkat rasio ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan bantuan dari pihak eksternal yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu penurunan rasio menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan juga retribusi menurun.
4. Menurut hasil perhitungan Rasio Keserasian, Pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan pengalokasian dana untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini ditandai dengan masih tinggi biaya yang dikeluarkan untuk belanja operasi dalam pemenuhan kebutuhan belanja pegawai. Dengan rata – rata rasio yang didapat adalah 83,51% untuk rasio belanja operasi dan 15,71% untuk rasio belanja modal.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 – 2020 berdasarkan Rasio Pertumbuhan mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan dari tahun 2017 – 2019 untuk pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif, namun untuk pertumbuhan PAD yang terjadi adalah pertumbuhan negatif. Untuk pertumbuhan dari tahun 2019 – 2020 semua aspek APBD mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai yang tinggi dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sesuai kesimpulan di atas adalah sebagai berikut. Saran bagi BPKA Kota Bandung:

1. Dalam hal mengoptimalkan perolehan PAD, bisa dengan cara tidak terlalu tinggi dalam mengganggu dana, tidak menaikkan terlalu tinggi anggaran pada periode selanjutnya jika realisasi pada tahun berjalan tidak mendekati anggaran, pemberian kebijakan – kebijakan yang sekiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak atau retribusi daerah, pemberian dukungan kepada perusahaan daerah agar pelayanan yang diberikan meningkat sehingga perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

2. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memperbesar alokasi untuk belanja modal dengan melakukan pembangunan terkait sarana dan prasarana umum yang memadai dan juga melakukan perawatan rutin agar sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
3. Dalam memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19, pemerintah dapat melakukan pemberian pelatihan wirausaha bagi karyawan yang terkena PHK, dan pemberian subsidi kepada industri UMKM. Dengan dilakukannya cara tersebut dapat menghindari penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja massal.

Saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Diharapkan dapat lebih merinci dalam menganalisa dan meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan juga melakukan wawancara lebih dalam sehingga dapat menjelaskan hasil penelitian lebih detail.
2. Bisa ditambahkan lagi rasio – rasio yang memungkinkan untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga ruang lingkup penelitian dapat lebih luas.

Daftar Pustaka

- Azhari, Fikri Reza. 2017. *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bandung
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Dona, Eka Meiliya, Verza Ayu Lestari. 2020. *Anlasis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku*
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda, & Rifqie Jauhari. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Opini WTP dari BPK*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. In Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Suhartanto. (2013). *Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah*. Pusdiklat Pengawasan BPKP
- Susanto, Hery. (2014). *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*
- Swardjono. (2011). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFY
- Tagar.id. (2020, 16 Juli). Kritisi Laporan Keuangan APBD 2019 Pemkot Bandung. Diakses pada 09 Desember 2020, dari <https://www.tagar.id/kritisi-laporan-keuangan-apbd-p2019-pemkot-bandung>
- Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan dantaran Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wikiapbn.org. (2015, 16 Februari). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02. Diakses pada 10 Januari 2021, dari <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-02/>